

**PERAN POLITIK KIAI DI SUMENEP PADA MASA ORDE  
BARU 1968-1997**



**TESIS**  
**Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya**  
**UIN Sunan Kalijaga untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar**  
**Magister Humaniora (M.Hum)**

**Oleh:**  
**Irfah Lihfidzi Ayatillah**  
**NIM: 19201020003**

**PROGRAM STUDI MAGISTER SEJARAH PERADABAN ISLAM**  
**FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
**2023**

## **HALAMAN MOTTO**

Meminta maaf dan memaafkan seringkali tidak hanya karena sungguh-sungguh menyadari kesalahan, lebih dari itu meminta maaf dan memaafkan adalah agar segala sesuatu menjadi lebih baik dan melegakan.



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Tesis ini saya persembahkan untuk kakek saya. Kakek yang sekaligus ayah bagi saya. Terimakasih untuk segalanya, Ke...

Saya persembahkan juga untuk ibu, ayah, dan nenek saya.





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 513949 Fax. (0274) 552883 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1301/Un.02/DA/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERAN POLITIK KIAI DI SUMEMEP PADA MASA ORDE BARU 1969-1998

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : - - IRFAH LIHIFDZI AYATILLAH, S.S, -  
Nomor Induk Mahasiswa : 19201020003  
Telah diujikan pada : Kamis, 20 Juli 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Syamsul Arifin, S.Ag. M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 64d5fb6ef200d



Penguji I

Dr. Badrun, M.Si.

SIGNED

Valid ID: 64d8c3b4cb67a



Penguji II

Dr. Imam Muhsin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 64d465d5286d9



Yogyakarta, 20 Juli 2023

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya

Prof. Dr. Muhammad Wildan, M.A.

SIGNED

Valid ID: 64d99d6220bfc

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irfah Lihifdzi Ayatillah  
NIM : 19201020003  
Program Studi : Magister Sejarah Peradaban Islam  
Fakultas : Adab dan Ilmu Budaya

menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Peran Politik Kiai Di Sumenep Pada Masa Orde Baru, 1968-1997” adalah hasil dari pemikiran sendiri bukan dari hasil plagiasi dari karya orang lain, kecuali pada bagian tertentu yang peneliti gunakan sebagai bahan rujukan dan telah dikutip sesuai dengan kaidah ilmiah dan tercantum pada daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti merupakan plagiat dari hasil karya orang lain, maka segala tanggung jawab ada pada peneliti sendiri.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 13 Agustus 2023

Yang menyatakan,



Irfah Lihifdzi Ayatillah

19201020003

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis Saudara:

Nama : Irfah Lihifdzi Ayatillah  
NIM : 19201020003  
Judul : Peran Politik Kiai di Sumenep Pada Masa Orde Baru,  
1968-1997

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Program Magister Sejarah Peradaban Islam (SPI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan sebagai syarat memperoleh gelar Magister Humaniora dalam bidang Sejarah Peradaban Islam (SPI). Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 Juli 2023

Pembimbing,



Dr. Syamsul Arifin, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19680212 200003 1 001

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT dan shalawat salam kepada Rasulullah. Alhamdulillah, akhirnya tesis ini akhirnya selesai dengan berbagai kekurangan. Tesis ini dikerjakan dengan penuh perjuangan dan air mata di tengah gempuran kehamilan dua kali dan mengurus dua balita.

Tesis ini berangkat dari ketidaksengajaan saat rencana tesis sebelumnya tidak lagi mungkin dilanjutkan. Latar belakang saya yang berasal dari Madura menyebabkan saya tidak bisa lepas dari ikatan emosional untuk menulis tentang Madura. Tesis ini berjudul “Peran Politik Kiai di Sumenep pada Masa Orde Baru 1968-1997”. Segala rintangan sudah terlewati setelah akhirnya tesis ini rampung ditulis. Untuk itu, saya ucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah ikut berkontribusi dalam penyelesaian tesis ini.

Saya ucapkan terimakasih kepada Bapak kaprodi sekaligus pembimbing akademik, dan juga sekaligus pembimbing tesis saya. Dengan bantuannya tesis ini berhasil selesai dan bisa diujikan. Terimakasih, Pak Syamsul. Kedua saya ucapkan terimakasih kepada bapak Badrun dan bapak Imam yang sudah bersedia menguji tesis ini. terimakasih juga untuk seluruh dosen dan staf prodi Sejarah Peradaban Islam yang ikut membantu melancarkan proses ujian tesis ini.

Terakhir namun utama, saya sangat berterimakasih kepada kakek saya Zawawi Imron yang selalu saya cintai dan mencintai saya. Tesis ini selesai bukan semata untuk gelar, tetapi persembahan bakti saya padanya. Saya bertahan dan terus berjuang menyelesaikan tesis ini semata demi kebahagiaan beliau. Terimakasih untuk kekasih, suami saya Mas Aufa yang bersedia mendukung dan membantu menyelesaikan tesis ini.

Terimakasih ibu-ibu saya, adek-adek, teman-teman, narasumber, dan semua yang terlibat dalam proses penggarapan tesis ini.

Yogyakarta, 13 Juni 2023

Irfah Lihfidzi Ayatillah

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Moto .....	ii
Halaman Persembahan .....	iii
Halaman Pengesahan .....	iv
Surat Pernyataan Keaslian .....	v
Nota Dinas Pembimbing .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	viii
Intisari .....	x
Abstract .....	xi
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II: GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SUMENEP .....</b>	<b>20</b>
A. Ekologi Kabupaten Sumenep .....	20
B. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat di Sumenep .....	24
C. Keagamaan Masyarakat Sumenep .....	29
D. Masuknya NU ke Sumenep .....	34
<b>BAB III: PERLAWANAN POLITIK KIAI DI KABUPATEN SUMENEP PADA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU .....</b>	<b>37</b>
A. Sosok Kiai, NU dan Politik di Sumenep .....	37
B. Sejarah Pemerintahan Orde Baru di Sumenep .....	47
C. Respon Politik Kiai dan Kebulatan Dukungan terhadap PPP .....	51
<b>BAB IV: KETERLIBATAN KIAI DALAM POLITIK DI SUMENEP PADA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU .....</b>	<b>62</b>
A. Pengaruh Kiai Dalam Pemilu .....	62
B. Represivitas Rezim Orde Baru pada Setiap Pemilu .....	71
C. Khittah NU dan berakhirnya dukungan terhadap PPP .....	74



BAB V: KESIMPULAN .....	81
Daftar Pustaka .....	84
Daftar Riwayat Hidup .....	91



## INTISARI

Penelitian ini berbicara tentang peran para kiai di Sumenep dalam ranah politik selama masa Orde Baru. Topik ini diangkat mengingat otoritas dan pengaruh kiai yang sangat besar bagi masyarakat Sumenep. Pemilihan kurun waktu dalam penelitian ini didasari oleh fakta bahwa pemerintah Orde Baru sangatlah otoriter, sehingga posisi para kiai sebagai pemimpin keagamaan di kalangan masyarakat mau tak mau ikut terseret ke ranah politik praktis. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kiai memainkan peranan politiknya pada saat itu. Metode yang digunakan adalah metode sejarah lisan. Peneliti mengumpulkan sumber dengan melakukan wawancara mendalam kepada para informan yang kredibel dan hidup sezaman dengan tahun penelitian. Sementara itu, konsep status dan peran juga digunakan untuk mendedah peran politik dari para kiai.

Hasil dari penelitian ini adalah temuan bahwa Orde Baru dengan pemerintahan yang otoriter terlihat jelas di Sumenep. Pegawai Negeri Sipil (PNS) banyak sekali mendapat tekanan. Mereka tidak hanya wajib memillih Golkar sebagai partai pemerintah, tetapi juga harus membantu berkampanye untuk kemenangan Golkar. Namun demikian, tekanan itu tidak seberapa kuat dirasakan oleh anggota PNS yang juga merupakan seorang kiai. Pihak yang paling banyak mendapat tekanan adalah masyarkat awam. Partai-partai yang akhirnya disederhanakan adalah salah satu bentuk kontrol politik pemerintah. Nahdlatul Ulama yang pada awalnya merupakan sebuah partai harus bergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dibentuk untuk mewadahi partai-partai Islam. Pada pemilu tahun 1977 dan 1982, PPP di Sumenep berhasil meraih kemenangan disebabkan oleh kebulatan dukungan para kiai dan ketaatan masyarakat terhadap mereka. Perubahan suhu politik secara signifikan terjadi setelah peristiwa NU kembali ke Khittah 1926 pada tahun 1984. Beberapa kiai mulai beralih haluan politik sehingga perolehan suara PPP menurun secara signifikan pada pemilu tahun 1987, 1992, dan 1997.

Kata kunci: Kiai, Orde Baru, Politik, Sumenep.

## ABSTRACT

This research talks about the role of *kiais* in Sumenep in political sphere during the New Order era. This topic was raised considering the enormous authority and influence of the *kiais* for the people of Sumenep. The choice of periodical frame in this study was because the New Order government was very authoritarian, so that the position of the *kiais* as religious leaders among the people was inevitably dragged into the realm of practical politics. The main problem in this research is how the *kiais* played their political role at that time. The method used in this research is oral history method. Researcher gathered sources by conducting in-depth interviews with credible informants who are contemporaneous with the periodical frame of the research. Meanwhile, the concepts of status and role are also used to dissect the political role of *kiais*.

The result of this research is a finding that the New Order with its authoritarian government was clearly visible in Sumenep. Civil Servants (*Pegawai Negeri Sipil*, PNS) were under a lot of pressure. They were not only obliged to choose Golkar as the government party, but also had to help campaigning for Golkar's victory. However, civil servants who were also *kiais* felt this pressure a lot less. The one that was under the most pressure is the common people. The finally simplified parties were a form of government political control. Nahdlatul Ulama, which was originally a party, had to join the United Development Party (*Partai Persatuan Pembangunan*, PPP), which was formed to accommodate Islamic parties. In the 1977 and 1982 elections, the PPP in Sumenep managed to win due to the unanimous support of the *kiais* and the obedience of the people towards them. A significant change in political temperature took place after NU returned to *Khittah* 1926 in 1984. Some *kiais* began to change their political orientation so that PPP's vote acquisition decreased significantly in the 1987, 1992 and 1997 elections.

Keywords: *Kiais*, New Order, Politics, Sumenep.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Selama beberapa dekade pascareformasi, pemimpin eksekutif di Sumenep selalu berasal dari kalangan kiai. Pada tahun 2000, jabatan bupati diduduki oleh kiai yang bernama Ramdhan Siradj. Ramdhan merupakan pengasuh Pesantren Nurul Islam di Karang Cempaka, Bluto. Ramdhan juga memiliki hubungan yang kuat dengan Pesantren Annuqayah, yang merupakan salah satu pesantren berpengaruh dalam dunia politik di Sumenep. Ibu Ramdhan merupakan cucu dari Kiai Syarkawi (pendiri Pesantren Annuqayah).

Saat pemilihan tahun 2000, Ramdhan diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Latar belakang Ramdhan sebagai kiai dan aktif dalam kepengurusan NU sejak tahun 1984 sebagai Sekretaris Tanfidziyah NU Sumenep. Hingga pada tahun 1995 Ramdhan berada pada puncak kepemimpinan NU Sumenep sebagai ketua tanfidziyah di usianya yang masih 45 tahun. Kondisi tersebut menyebabkan Ramdhan cukup mumpuni untuk maju dalam pemilihan bupati. Ia memiliki basis massa yang berasal dari masyarakat NU. Kekuatan ini juga dibuktikan saat Ramdhan kembali menjabat pada periode berikutnya.

Setelah dua periode menjabat, Ramdhan digantikan oleh Busyro Karim. Busyro juga merupakan seorang kiai yang memimpin sebuah pesantren, Pesantren Al Karimiyah Baraji Sumenep. Tentu basis massa yang dimiliki Busyro juga kuat. Hal ini dipengaruhi oleh sosoknya sebagai seorang pemimpin pesantren dan

jabatannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sumenep selama dua periode 1999-2009 dengan PKB sebagai partai pengusung. Pada tahun 2004, Busyro hendak berkompetisi dalam pencalonan bupati Sumenep melalui PKB. Namun, hal tersebut ditolak oleh banyak kalangan. Ramdhan masih dipandang sebagai calon yang kuat untuk kembali menjabat pada periode 2004-2009.

Dalam pencalonan Busyro sebagai bupati Sumenep, PKB tidak hanya memperhatikan popularitas, integritas, dan elektabilitas calon. PKB juga lebih menekankan anggota internal partai sebagai calon bupati.<sup>1</sup> Pada tahun 2010, akhirnya Busyro resmi mencalonkan diri sebagai bupati Sumenep dan berhasil menduduki jabatan tersebut. Pada tahun 2015, Busyro kembali memenangkan pemilukada melawan Zainal Abidin-Dewi Kholifah dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Terpilihnya dua sosok tersebut sebagai bupati di Sumenep tidak terlepas dari pengaruh kendaraan politik mereka, yakni PKB. PKB memang bukan partai yang dibentuk dengan asas Islam. Namun massa partai tersebut adalah umat Islam, khususnya NU yang merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia. Terpilihnya dua sosok kiai pada saat itu, menjadikan penulis untuk melihat situasi politik pada rezim sebelumnya. Rezim Orde Baru dengan kebijakan yang mengikat dan sangat represif yang dapat dianggap sebagai penyebab menggeliatnya politik kiai dan santri di Sumenep. Pada masa Orde Baru, pemerintah selalu menentukan bupati yang akan menjabat di kabupaten Sumenep. Bupati yang terpilih selalu berasal dari anggota militer. Setelah runtuhnya Orde

---

<sup>1</sup>Ainur Rohmatin, "Relasi informal dan Formal Politik PKB dalam Penjaringan Calon Bupati Sumenep tahun 2015", dalam *Jurnal Politik Muda*, Vol. 5, No. 2, April-Juli 2016, hlm. 244.

Baru, politik di Sumenep mendapat angin segar. Sehingga, pada masa reformasi, bahkan hingga saat ini bupati dan pejabat politik mayoritas berasal dari kalangan kiai dan santri.

Masyarakat Madura sendiri merupakan masyarakat dengan mayoritas muslim tradisional, yang masih menjalankan tradisi-tradisi lokal. Mulai dari penghormatan pada saat kematian, atau pun perayaan dan ritual-ritual saat kehamilan dan pernikahan. Masyarakat Sumenep masih menganut peringatan hari ketiga, ketujuh, hari ke-40 kematian dan seterusnya. Dengan demikian, NU menjadi wadah yang tepat bagi umat Islam tradisional di Sumenep. Sejak masa kolonial, NU memang lebih diterima oleh masyarakat Madura, terlebih setelah Sarekat Islam (SI) mulai runtuh akibat terlalu mementingkan politik dari pada agama. NU berbeda dengan SI yang dalam perkembangannya semakin politis, juga berbeda dengan Muhammadiyah yang terlalu modernis. Kiai-kiai Madura yang semua mendukung SI berpindah memberikan dukungan pada NU.<sup>2</sup> Perkembangan NU di Madura secara umum semakin kuat. Dengan demikian tidak mengherankan dan menjadi wajar bahwa tokoh kiai di Madura berhasil memenangkan pemilu-pemilu di Madura, karena adanya basis massa yang kuat yaitu umat Islam tradisional.

Selain posisi dan pengaruh kiai yang memang kuat. Dilihat secara historis, kemenangan kiai menjadi anggota legislatif, maupun menjadi bupati di Sumenep juga merupakan bentuk euphoria kaum santri secara politis pascareformasi. Selama lebih dari tiga decade sebelumnya, rezim Orde Baru telah sedemikian

---

<sup>2</sup> Kuntowijoyo, *Perubahan Agraris dalam Masyarakat Madura 1850-1940*, (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002), hlm. 536-537.

represif terhadap masyarakat. Misalnya, apa yang terjadi di Sumenep pada tahun 1975, Bupati Sumenep berasal dari anggota militer yang bukan putra daerah, Soemar'oem yang berkuasa hingga 1985. Kemudian digantikan oleh Kolonel Soegondo 1985-1995, dan Kolonel Soekarno 1995-2000. Para bupati yang berasal dari kalangan militer ini memiliki tujuan tersendiri, yaitu untuk memenangkan Golkar di Sumenep yang merupakan daerah dengan basis PPP. Hal ini merupakan bentuk represi Pemerintah Orde Baru agar bisa tetap mempertahankan dan memperkuat kekuasaannya. Kondisi semacam ini tidak hanya terjadi di tingkat lokal Sumenep. Tetapi banyak sekali represi dan propaganda Pemerintah Orde Baru untuk kepentingan kekuasaan.<sup>3</sup> Hal ini sudah menjadi rahasia umum ketika hampir di setiap pemilu terjadi banyak kecurangan dengan pemalsuan surat suara maupun hasil suara yang berbeda jumlahnya saat masih di desa dan setelah sampai di kecamatan.

Politik dan agama selalu menarik untuk diperbincangkan, terlebih pada masa Orde Baru. Pada saat itu, terjadi banyak tindakan represif pemerintah Orde Baru terhadap umat Islam di tingkat nasional maupun lokal. Seperti yang sekilas dibahas sebelumnya. Bahkan sejak awal rezim Orde Baru baru saja dibentuk, telah terjadi tindakan represif yaitu penolakan usaha rehabilitasi Masyumi. Dengan kembalinya Masyumi, pemerintah khawatir kekuatan umat Islam akan lebih mudah untuk dimobilisasi. Represi berikutnya adalah saat Muhammad Rum terpilih sebagai Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia (PMI). Di masa sebelumnya, Muhammad Rum merupakan tokoh Masyumi. Oleh sebab itu,

---

<sup>3</sup> Abdul Gaffar Karim, *Menegosiasi Ulang Indonesia, Perubahan Politik dan Lembaga-Lembaga Agama di Manado dan Sumenep dalam Era Awal Reformasi*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hlm. 234.

Presiden Soeharto secara langsung melalui Jenderal Alamsyah mengirim telegram untuk memberi tahu bahwa Muhammad Rum tidak diterima oleh pemerintah untuk menjadi Ketua Umum PMI.<sup>4</sup>

Pada tahun 1973, terjadi penyederhanaan partai-partai. Partai yang semula berjumlah belasan disederhanakan menjadi dua partai saja dan satu Yayasan Golongan Karya (Golkar). Golkar tidak dimasukkan sebagai kategori partai, tetapi diizinkan tergabung dalam pemilu. Partai disederhanakan menjadi, pertama, partai dengan asas Nasionalisme disatukan dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan partai dengan asas Islam disatukan dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan terakhir Partai Golkar. Dengan demikian, NU tergabung dalam PPP. Penyederhanaan partai-partai ini dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru sebagai bentuk kontrol politik dan dengan alasan agar pembangunan Nasional dapat terlaksana. Tindakan ini dapat dilihat sebagai bentuk represi mengingat melakukan pembatasan dalam berpolitik.

Setelah terjadi fusi partai-partai, NU yang tergabung dalam PPP mulai mengalami disorientasi. Walaupun tokoh-tokoh NU mendapat posisi sebagai Syuro, namun posisi tersebut tidak seberapa memberikan hak untuk menentukan kebijakan partai. Selain itu, berdasarkan kebijakan umum ketua umum partai, beberapa tokoh yang dianggap representatif justru disingkirkan dari pencalonan DPR RI. Hal tersebut tentu saja menimbulkan konflik internal dalam tubuh PPP.

Berbagai persoalan yang dihadapi NU dalam tubuh PPP menyebabkan NU melakukan gerakan kembali ke khittah tahun 1926 melalui Musyawarah Nasional

---

<sup>4</sup> Affan Gaffar, "Islam dan Politik dalam Era Orde Baru", dalam *Jurnal Unisia*, No. 17, Tahun XIII Triwulan VI, 1993, hlm. 71.



(Munas) yang melibatkan ulama-ulama NU di Situbondo pada tahun 1983. Munas yang dilakukan mengakibatkan NU secara resmi menyatakan keluar dari PPP dan partai politik. Hal tersebut disepakati melalui Mukhtamar NU di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo pada tahun 1984. NU secara tegas berhenti melibatkan diri dalam politik praktis.

Seperti telah menjadi pengetahuan umum bahwa masyarakat Madura dikenal dengan keislaman yang kuat dan penghormatan yang luar biasa terhadap kiai, demikian halnya juga dengan masyarakat Sumenep. Di samping itu, Rezim Orde Baru sangat represif terhadap umat Islam. Kondisi tersebut juga menyebabkan banyak keputusan pemerintah Orde Baru yang bersifat represif di Sumenep, mengingat kuatnya Islam di Sumenep. Sehingga terjadi hubungan yang cukup dinamis antara kiai dan pemerintah. Termasuk terlibatnya kiai dalam struktur pemerintahan di Sumenep.

Otoritas kiai di Sumenep sangat menarik untuk dilihat juga perannya dalam bidang politik. Hal ini menjadi menarik ketika melihat kiai yang sedemikian rupa mempengaruhi sistem sosial, budaya, dan ritual keagamaan di Sumenep. Penulis meyakini bahwa kiai juga cukup kuat memberikan pengaruh dalam bidang politik bagi masyarakat di Sumenep, mengingat pentingnya posisi kiai bagi masyarakat Sumenep.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Masa transisi politik masa Orde Lama dan Orde Baru masih sangat relevan untuk dikaji dalam sudut pandang sejarah. Terlebih jika melihat bagaimana peran

kiai-kiai NU di Sumenep Madura dengan mayoritas masyarakat muslim dan banyaknya pesantren di sana. Penelitian ini fokus membahas mengenai Peran Kiai NU dalam Politik di Sumenep pada Masa Orde Baru. Penelitian ini bermula pada tahun 1968, mengingat 1968 merupakan dimulainya rezim Orde Baru. Dengan begitu dapat dilihat perubahan-perubahan politik yang dibawa oleh pemerintah Orde Baru di Sumenep. Penelitian ini berakhir pada tahun 1997 yang merupakan masa transisi sebelum akhirnya pemerintah Orde Baru runtuh. Pada tahun tersebut pula dapat ditemui partai Islam sudah mulai mengalami penurunan hasil suara akibat muktamar NU yang dilaksanakan sebelum pemilu 1987. Dengan demikian suhu politik lagi-lagi mengalami perubahan.

Berikut rumusan masalah yang diajukan dalam proposal ini. selain untuk mempermudah proses penelitian ini, rumusan masalah juga membantu agar pembahasan menjadi lebih runut.

1. Bagaimana kondisi masyarakat di Sumenep?
2. Bagaimana hubungan NU, Kiai, dan politik di Sumenep?
3. Bagaimana keterlibatan kiai dalam politik di Sumenep pada masa Orde Baru?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Mengetahui masyarakat di Sumenep
  - b. Mencari tahu hubungan NU, Kiai, dan politik di Sumenep.

- c. Menyelisik keterlibatan kiai dalam politik di Sumenep pada masa Orde Baru.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai sumbangan peneliti bagi khazanah keilmuan sejarah peradaban Islam mengenai studi sejarah-sejarah Madura, khususnya mengenai keterlibatan kiai dalam politik di Sumenep pada masa Orde Baru.
- b. Dapat dijadikan bahan rujukan pemerintah setempat dalam melihat perkembangan politik di masa lalu, juga sebagai bahan komparasi dengan perkembangan politik di Sumenep baru-baru ini.
- c. Dapat dijadikan rujukan awal peneliti yang sedang melakukan penelitian dengan tema sejarah politik di Sumenep, Kiai dan hubungannya dengan politik.

## D. Kajian Pustaka

Karya ilmiah dan penelitian mengenai Madura sudah banyak ditemui di berbagai kampus, maupun yang sudah diterbitkan menjadi buku dan jurnal. Penelitian mengenai Madura juga sudah dilakukan dalam berbagai sudut pandang, mulai dari politik, sosiologi, maupun sejarah. Dengan demikian, sudah banyak penelitian yang memiliki persamaan objek dan kedekatan tema dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Dengan melihat penelitian sebelumnya peneliti dapat menghindari plagiarisme, dan dapat dijadikan rujukan awal dalam melakukan penelitian ini. Penelitian ini sendiri berjudul Peran Kiai NU dalam

Politik di Sumenep pada Masa Orde Baru, yang nanti akan berbicara bagaimana sosok kharismatik yang sejak awal hanya berfokus pada kemajuan pendidikan Agama terutama, memandang politik dan keterlibatannya dalam politik secara langsung maupun tidak.

Pembahasan mengenai Madura memang tidak lepas dari eratnya hubungan masyarakat dengan tokoh agama atau kiai dan ketaatan mereka dalam beragama. Dengan demikian sisi politik di Sumenep juga memiliki ikatan dengan kiai. Terlebih di masa orde baru yang banyak kebijakannya dipandang merugikan umat Islam. Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Rusli dalam bukunya *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai pembangunan dalam kurun tahun 1970-an hingga akhir 1990-an berimplikasi pada kondisi Islam dan perkembangan suhu politik saat itu. Implikasi terhadap Islam yang dimaksudkan adalah peminggiran Islam, antara lain birokratisasi, jwanisasi, departisasi, militerisasi, dan deideologisasi.<sup>5</sup> Aziz dalam *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, juga menguatkan bahwa Islam pada masa Orde Baru sering kali dipandang sebagai ancaman bagi pemerintah, sehingga kebijakan politik pada saat itu cenderung merugikan umat Islam.<sup>6</sup> Dua tulisan Rusli dan Aziz setidaknya memberikan gambaran umum bagaimana posisi Islam dan memberikan informasi awal mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah yang merugikan umat Islam. Meskipun tentu saja juga ada kebijakan-kebijakan yang bersifat akomodatif terhadap Islam, tetapi di akhir pemerintahan Orde baru. Kebijakan-kebijakan yang

---

<sup>5</sup> M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999).

<sup>6</sup> Abdul Aziz Thaha, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

tidak berpihak tersebut akan coba dilihat dalam tingkat lokal Sumenep. Termasuk peran kiai di tingkat lokal dalam menanggapi suhu politik yang tidak berpihak pada umat Islam.

Dalam skripsinya yang berjudul *Kiai dan Politik, Studi Kasus Perilaku Politik Kiai dalam Konflik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pasca Muktamar II Semarang*, Ichwan Arifin juga menuliskan mengenai hubungan kiai dan politik di Semarang yang fokus pada studi kasus perilaku politik kiai dalam konflik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pasca muktamar kedua. Dengan melihat penelitian Ichwan, penulis dapat melihat perbedaan mengenai hubungan kiai dan politik di kota besar dan tingkat lokal tradisional Sumenep.<sup>7</sup> Dalam penelitiannya *Peran Sosial Politik Kiai di Indonesia*, Miftah Faridl menarik kesimpulan bahwa hanya sebagian kiai saja yang secara aktif tanggap terhadap isu-isu politik, sebagian lainnya lebih fokus dalam pengembangan pendidikan saja. Kiai yang aktif dan tanggap terhadap isu politik bahkan juga terlibat langsung dalam partai politik.<sup>8</sup> Hal ini juga akan dilihat dalam perpolitikan kiai di Sumenep. Namun demikian, menariknya, Imam Zamroni menjelaskan bahwa kebijakan-kebijakan yang dianggap represif pada masa Orde Baru justru menyebabkan lonjakan jumlah elite agama di Madura dan juga kiai yang terlibat dalam politik.<sup>9</sup>

Penelitian ini berbicara mengenai kiai dan politik di Madura. Tema yang dibahas memang sama dengan apa yang sudah ditulis oleh Ichwan Arif, hanya

---

<sup>7</sup> Ichwan Arif, *Kiai dan Politik, Studi Kasus Perilaku Politik Kiai dalam Konflik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pasca Muktamar II Semarang*, (Semarang: Prodi Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, 2008), hlm. 149.

<sup>8</sup> Miftah Faridl, "Peran Sosial Politik Kiai di Indonesia" dalam *Jurnal Mimbar*, Volume XIX, No. 2, April-Juni, 2003, hlm. 201-202.

<sup>9</sup> Imam Zamroni, "Juragan, Kiai, dan Politik di Madura" dalam *Jurnal UNISIA*, Vol.XXX, No. 65, September, 2007, hlm. 274.

saja penulis memiliki perbedaan dalam hal tahun penelitian, tempat dan tentu saja juga memiliki perbedaan yang signifikan. Masyarakat Sumenep dan Semarang tentu sangat berbeda mengingat Semarang adalah sebuah kota besar, sementara Sumenep hanyalah sebuah kabupaten kecil yang terletak di ujung timur pulau Madura.

### **E. Kerangka Teoritik**

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah dengan berusaha mendapatkan hasil penelitian yang kronologis, sistematis, dan terstruktur. Sebagai sebuah ilmu, sejarah tidak bisa berdiri sendiri, oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan disiplin ilmu lain untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih luas dan mendalam. Untuk melihat hubungan kiai dan masyarakat tidak bisa terlepas dari konsep-konsep sosiologi. Terlebih saat akan membahas mengenai peran kiai dalam politik di Sumenep.

Kiai merupakan pemuka agama yang memiliki keahlian dalam bidang keagamaan, biasanya juga memiliki lembaga pesantren yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran, serta menjadi panutan agama bagi masyarakat sekitar. Kiai dijadikan panutan karena dianggap akan dapat menuntun masyarakat di jalan kebaikan.<sup>10</sup>

Tesis ini menggunakan teori yang digagas oleh Erving Goffman, yang berusaha memperhatikan interaksi antar individu yang dapat mempengaruhi tindakan mereka satu sama lain saat mereka saling berhadapan. Teori ini dikenal

---

<sup>10</sup> Mufti Ali, *Beberapa Aspek Ajaran Islam* (Bandung; Mizan, 1991), hlm 24.

dengan “teori panggung” (dramaturgi), teori ini berkaitan dengan individu dalam banyak adegan (panggung). Proses interaksi seseorang dapat dilihat melalui perilaku dan tindakan sehari-hari. Dalam pertunjukan selalu ada dua sisi yaitu panggung depan dan panggung belakang. Panggung depan merupakan pertunjukan atau penampilan seseorang yang umumnya bersifat teratur agar dapat mendefinisikan situasi di sekelilingnya. Untuk identifikasi panggung belakang tergantung penonton yang bersangkutan, atau hanya diketahui tim saja.<sup>11</sup>

Dalam hal ini, penulis menggunakan teori dramaturgi agar dapat menjelaskan proses interaksi kiai-kiai di Sumenep dalam beberapa adegan. Seperti apa peran-peran yang dapat ditampilkan oleh kiai dalam panggung politik di Sumenep. Seperti kemudian kiai menjadi broker politik, panutan masyarakat dalam menentukan pilihan partai politik. Seringkali juga menjadi penengah atau bahkan pelindung saat terjadi konflik antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, tidak terlepas juga dari perannya sehari-hari sebagai suami, ayah, dan kepala keluarga. Termasuk juga pandangan masyarakat atau penonton dalam mendukung dan menilai kiprah kiai.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosial dan politik. Pendekatan sosial digunakan untuk melihat status atau posisi kiai dalam interaksi sosial di tengah masyarakat Sumenep. Definisi politik sendiri identik dengan hubungan pemerintah dan negara.<sup>12</sup> Pendekatan politik digunakan tentu saja untuk melihat aktivitas kiai yang berhubungan dengan politik. Serta bagaimana posisi kiai saat

---

<sup>11</sup>Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, terj. Yasogama (Yasasan Solidaritas Gajah Mada), (Jakarta; PT. Grafindo Persada, 1984), hlm. 229-237. Dalam Ganang Mukti, K.H. Muntaha 1946-2004 (Aktivitasnya dalam Bidang Sosial, Politik, dan Agama), *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri, 2014), hlm. 9.

<sup>12</sup>Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, hlm. 173.

pemilu akan dan sedang berlangsung. Juga untuk melihat kegiatan-kegiatan kiai yang berhubungan dengan pemerintah dan birokrasi.

Kiai di Sumenep merupakan sosok sentral yang sangat dipertimbangkan pendapat dan sarannya dalam berbagai sisi kehidupan masyarakat. Bahkan sekali pun Sumenep memiliki keraton dan simbol-simbol kebangsawanan, hingga kini otoritas bangsawan semakin menurun. Kiai adalah sosok yang berhasil menggeser otoritas bangsawan di Sumenep. Hal ini kemudian mempengaruhi berbagai sisi kehidupan masyarakat Sumenep, mulai dari sistem sosial, pendidikan, dan tentu saja politik di Sumenep. Dengan demikian, kehidupan politik di Sumenep sangat banyak dipengaruhi oleh status dan peran kiai di sana.

Dalam melihat hubungan kiai dengan masyarakat dapat melalui konsep sosiologi, dengan teori status dan peran (role). Menurut Soekanto, peran merupakan aspek dinamis dari sebuah status pada seseorang. Jika seseorang berhasil melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan atau statusnya, maka berarti ia juga berhasil menjalankan sebuah peranan.<sup>13</sup> Narwoko dan Suyanto menambahkan bahwa salah satu cakupan suatu peran adalah perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>14</sup> Dengan demikian, kiai sebagai pemuka agama di tengah-tengah masyarakat Sumenep yang sangat kental dengan Islam tradisional, memiliki beragam peran seperti menjadi penengah konflik dalam masyarakat, rmenjadi ujukan dalam masalah-masalah agama, juga termasuk panutan dalam pilihan politik masyarakat.

---

<sup>13</sup> Soekanto, *Sosiologi dan Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hlm. 212.

<sup>14</sup> Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 159.



Posisi kiai sebagai pemimpin dalam masyarakat Sumenep juga sangat berdampak pada perpolitikan di Sumenep. Misalnya, menjadi broker politik. Kapanjangan pemerintah untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan politik ke level bawah. Lebih lanjut lagi, jika kiai memiliki basis massa, mereka juga bisa berperan langsung dalam politik. Misalnya, terlibat dalam sebuah partai, terpilih sebagai anggota DPR, dan ikut andil sebagai pembuat kebijakan. Dengan demikian, penulis berusaha melihat peran politik kiai di Sumenep dengan konsep maupun teori status dan peran. Mengingat kiai yang banyak sekali memberikan pengaruh dalam berbagai sisi kehidupan masyarakat Sumenep.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Sebagian besar penelitian sejarah termasuk dalam penelitian kualitatif dengan studi pustaka. Kuntowijoyo menjelaskan bahwa metode sejarah merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam proses penelitian guna mendapatkan jawaban atas masalah-masalah yang diajukan sejak awal.<sup>15</sup> Louis menambahkan bahwa metode sejarah merupakan serangkaian proses rekonstruksi peristiwa sejarah berdasarkan data-data yang telah diperoleh. Daliman menyebutkan bahwa metode sejarah terdiri dari empat tahap, heuristik atau pencarian dan pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi, dan historiografi atau penyusunan dan penulisan peristiwa sejarah.<sup>16</sup> Kuntowijoyo sedikit memiliki perbedaan dalam tahapan metode sejarah. Kuntowijoyo melalui proses pemilihan topik terlebih dahulu sebelum masuk pada

---

<sup>15</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang, 2005, hlm. 19.

<sup>16</sup> Daliman, hlm. 22.

tahap verifikasi. Penelitian ini akan mengacu pada metode dengan empat tahap sebagai berikut:

1. Heuristik

Menurut Kuntowijoyo, Heuristik merupakan tahap pencarian dan pengumpulan sumber, baik tertulis maupun tidak tertulis. Upaya pengumpulan sumber dalam penelitian ini lebih banyak didapatkan melalui proses wawancara terhadap narasumber yang relevan dengan penelitian ini. sumber tertulis juga digunakan sebagai penunjang penelitian, mulai dari data DPRD Sumenep tentang kiai-kiai yang terlibat dalam politik langsung sebagai anggota DPRD pada saat itu, laporan-laporan hasil rapat anggota DPRD Sumenep, hasil rekapitulasi perolehan suara dalam pemilu dari tahun ke tahun, Koran, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan dokumen-dokumen pribadi yang dimiliki oleh narasumber. Sumber tertulis juga didapatkan melalui akun resmi perpustakaan-perpustakaan seperti UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Sunan Ampel Surabaya, Universitas Gadjah Mada, Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumenep, Perpustakaan Pamekasan, dan perpustakaan pribadi narasumber.

Proses wawancara sendiri dilakukan dengan mendata narasumber yang dianggap memiliki kompetensi dan relevansi dengan topik penelitian. Kemudian metode wawancara yang diterapkan adalah metode yang digagas oleh Thompson. Secara umum Thompson membagi wawancara ke dalam dua macam gaya wawancara. Pertama adalah objektif komparatif yang merujuk pada gaya wawancara yang kaku, terstruktur, untuk memperoleh fakta-fakta yang

sifatnya general. Kedua, gaya wawancara diskusi bebas yang merupakan wawancara yang tidak terikat, mengalir, dan bersifat lebih santai.<sup>17</sup>

Menurut Kuntowijoyo, sejarah lisan tidak hanya bisa digunakan sebagai metode dalam pengumpulan sumber, sejarah lisan akan sangat berguna untuk mengembangkan substansi dalam penulisan sejarah. Pertama, sejarah lisan yang bersifat kontemporer akan sangat mungkin untuk menggali informasi sejarah yang lebih luas dari pelaku maupun saksi sejarah. Kedua, sejarah lisan juga dapat menjangkau informasi dan pelaku sejarah yang tidak didapatkan dari sumber dokumen. Ketiga, sejarah akan lebih luas dalam mengkaji suatu peristiwa sejarah karena tidak lagi hanya terikat pada adanya sumber tertulis atau dokumen.<sup>18</sup>

## 2. Verifikasi

Setelah proses heuristik selesai, sumber yang terkumpul kemudian diuji kredibilitas dan autentitasnya.<sup>19</sup> Langkah ini disebut verifikasi atau kritik sumber. Kritik sumber dilakukan melalui dua tahap, pertama kritik eksternal yang dilakukan dengan identitas sumber yang didapat, bahasa yang digunakan, atau latar belakang narasumber jika sumber tersebut melalui proses wawancara. Kedua, kritik eksternal yang dilakukan dengan berusaha membaca dan menelaah sumber, menyingkronkan satu informasi dari satu sumber dengan sumber yang lain. Hal tersebut dilakukan agar fakta yang didapat tidak rancu satu sama lain. Informasi yang didapatkan setelah proses kritik sumber disebut fakta sejarah.

---

<sup>17</sup> Aufannuha Ihsani, *Kebangsaan di Tengah Perubahan: Kehidupan Sosial Kaum Ningrat Sumenep tahun 1950-an*, (Yogyakarta: UGM, 2020), hlm. 23-24.

<sup>18</sup> Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2003), hlm. 29-30.

<sup>19</sup> Sutrisni Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Fak. Psikologi UGM, 1978), hlm. 193.

### 3. Interpretasi

Tahap ini merupakan proses penafsiran atas fakta yang didapat melalui proses kritik sumber. Tahap ini seringkali juga disebut sebagai analisis sejarah.<sup>20</sup> Interpretasi memiliki tujuan untuk menyatukan sejumlah fakta dari sumber-sumber sejarah. Proses penggabungan ini dikenal dengan sintesis, yang setelahnya proses ini akan menghasilkan satu-kesatuan rangkaian peristiwa. Fakta-fakta yang sudah melalui proses interpretasi akan disusun dengan teori dan pendekatan-pendekatan sehingga menjadi satu kesatuan peristiwa yang sistematis dan kronologis.

### 4. Historiografi

Historiografi merupakan langkah terakhir dalam proses penelitian sejarah. Proses ini yang nantinya akan menghasilkan hasil penelitian sejarah yang utuh. Historiografi ini dikenal juga dengan penulisan sejarah, pemaparan, dan atau laporan hasil penelitian sejarah setelah melakukan tahap-tahap sebelumnya.<sup>21</sup> Selayaknya laporan penelitian ilmiah, maka penulisan hasil penelitian sejarah seharusnya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian sejak awal hingga akhir pengambilan kesimpulan. Historiografi dilakukan dengan menuliskan fakta-fakta sejarah menjadi satu kesatuan peristiwa sejarah yang kronologis.

---

<sup>20</sup> Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm. 11.

<sup>21</sup> Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 67.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini disusun secara sistematis yang terdiri dari lima bab. Setiap bab sendiri akan memiliki hubungan satu sama lain. Berikut penjelasan dari setiap bab yang akan ditulis:

Bab I Pendahuluan yang berisi penjelasan umum penelitian. Bab ini akan memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah serta batasan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan konseptual, dan metode penelitian. Bab I menjadi acuan bagi peneliti untuk memudahkan proses penelitian.

Bab II merupakan bab yang memberikan gambaran umum tentang kondisi geografis dan ekologi di Sumenep. Kemudian juga mengkaji tentang sosial, politik, dan keagamaan masyarakat Sumenep. Hal ini akan membantu pembaca untuk dapat melihat garis besar Sumenep, mulai dari masyarakatnya, ekologi, maupun kondisi keagamaan masyarakat.

Bab III berisi tentang pokok bahasan dari penelitian ini. Dalam bab ini membahas masyarakat Sumenep sebagai warga yang memiliki ketaatan beragama serta hubungannya dengan kiai dan NU. Lebih jauh, dalam bab ini akan banyak mengulik mengenai posisi kiai dalam masyarakat. Kedekatan masyarakat Sumenep dengan NU juga akan dibahas dalam bab ini, termasuk kelahiran NU hingga posisinya di masa Orde Baru.

Bab IV membahas tentang peran kiai dalam politik elektoral di Sumenep. Pembahasan akan dimulai dengan kondisi Sumenep pada masa Orde Baru, kemudian pemilu pertama pada masa Orde Baru, terjadinya fusi partai, represi-

represi rezim Orde Baru hampir dalam setiap pemilu di Sumenep, dan keputusan NU untuk kembali ke khittah serta berakhirnya dukungan struktural terhadap PPP.

Bab V merupakan bab pamungkas atau kesimpulan berisi jawaban-jawaban atas rumusan masalah yang diajukan di awal penelitian. Lebih jauh, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai temuan-temuan yang berhasil didapat selama proses penelitian berlangsung. Selain itu, dalam bab ini juga berisi kritik dan saran untuk menjadi catatan bagi peneliti selanjutnya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Kondisi geografis Sumenep yang secara umum sama dengan kondisi geografis Madura menyebabkan kesamaan karakteristik masyarakat. Kondisi tanah yang gersang dan tandus berdampak secara sosial dan budaya masyarakat. Misalnya unit-unit ekonomi dalam pertanian di Madura adalah masing-masing keluarga. Ketiadaan pengaturan air secara komunal ini mengakibatkan masyarakat Madura tidak diikat dalam birokrasi desa, akan tetapi dalam satu sistem simbol. Simbol tersebut adalah Agama Islam. Kondisi ekologis ini berbeda dengan pengaturan irigasi secara komunal layaknya di Jawa.

Kondisi sosial budaya masyarakat dipengaruhi oleh berbagai hal. Status ekonomi adalah hal yang paling mempengaruhi kelas sosial masyarakat. Selain itu, tokoh agama juga mendapat kedudukan yang cukup strategis, karena seperti yang sudah banyak disinggung bahwa masyarakat Madura sangat taat beragama. Sehingga, pada masanya, tokoh agama berhasil menggeser posisi kalangan ningrat dalam masyarakat.

Masyarakat Sumenep dikenal sangat taat beragama. Tokoh agama dalam masyarakat Sumenep menempati tempat yang istimewa. Kiai bagi masyarakat Sumenep bukan sekedar guru ngaji, tapi juga panutan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam sisi sosial, budaya, dan politik. Hubungan kiai dan masyarakat Sumenep ini mempengaruhi ritual keagamaan masyarakat Sumenep. Kendati tidak seluruhnya masyarakat Sumenep tergabung aktif secara struktural dalam

Organisasi Nahdlatul Ulama (NU), masyarakat Sumenep secara kultural menjalani kehidupan beragama dengan cara ahlussunnah wal jama'ah seperti yang diajarkan dan dianut oleh pengikut NU. Kesetiaan masyarakat terhadap NU ini kemudian berdampak terhadap kehidupan politik. Selain mengikuti jejak kiai, kesetiaan mereka pada NU yang menentukan keberlangsungan politik di Sumenep.

Rezim Orde Baru dikenal sangat otoriter dan sangat represif. Hal tersebut memberikan dampak yang cukup besar terhadap suhu politik yang ada di Sumenep. Sikap otoriter ini salah satunya ditunjukkan saat pemerintah Orde Baru melakukan fusi partai-partai pada tahun 1973. Setelah NU tergabung dalam PPP, maka pilihan politik masyarakat Sumenep sangat mempengaruhi hasil pemilu. Fusi atau penyederhanaan partai ini dilakukan oleh pemerintah Orde Baru agar lebih mudah memantau dan mengontrol pergerakan politik di Indonesia.

Pengaruh kiai dalam politik di Sumenep sangat terlihat pemilu yang berlangsung selama masa Orde Baru, terutama setelah terjadi fusi partai. Kemenangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Sumenep merupakan andil besar dari kiai-kiai. PPP yang merupakan hasil fusi dari partai-partai Islam, termasuk NU di dalamnya menjadi alasan kemenangan partai ini di Sumenep. Sangat jelas sekali bahwa kemenangan PPP ini dipengaruhi oleh peran kiai dan NU.

Meskipun Orde Baru sedemikian rupa melakukan represivitas terhadap masyarakat Sumenep yang tidak pro Golkar, tetapi hasil pemilu membuktikan bahwa tekanan dari pemerintah tidak menyurutkan semangat masyarakat untuk memenangkan PPP. Bahkan, masyarakat yang terikat dengan pemerintah sebagai



Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekalipun, juga berani menunjukkan penolakan untuk melakukan kampanye Golkar. Meskipun pemerintah selalu memberikan ancaman untuk memutasi kerja mereka ke daerah atau pulau-pulau terpencil yang ada di Sumenep. Beberapa orang memang patuh karena tekanan dan kekhawatiran jauh dari keluarga jika akhirnya benar-benar dimutasi. Namun, tidak jarang juga menolak tegas kampanye, hingga akhirnya dimutasi kerja dengan mengajar SD di pulau kecil di Sumenep.

Dalam melakukan kampanye untuk kemenangan PPP, kiai tidak perlu melakukan aksi apapun. Ketaatan masyarakat Sumenep terhadap kiai yang berdampak besar terhadap perpolitikan di Sumenep. Biasanya alumni santri yang cukup dekat dengan kiai yang akan menjadi juru bicara mengenai pilihan politik kiai. Tekanan pemerintah terhadap kiai juga tidak sekuat terhadap masyarakat sipil. Sehingga posisi kiai untuk secara terang-terangan memilih PPP aman. Setidaknya, dalam dua kali pemilu di Sumenep, yaitu pemilu tahun 1977 dan pemilu tahun 1982 PPP mengalami kemenangan suara yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan dua partai lainnya. Bahkan setelah banyak sekali kecurangan pemerintah selama pemilu berlangsung.

Kemenangan PPP mulai mengalami gejolak setelah NU memutuskan untuk kembali ke khittah 1926. Secara tegas dan terbuka menyampaikan bahwa NU tidak lagi mendukung PPP dan tidak pula mendukung partai apapun. Secara politik, NU tidak lagi berafiliasi dengan partai apapun. NU bukan lagi PPP dan PPP bukan lagi NU. Seluruh warga NU pun dibebaskan untuk memilih. Kondisi

ini menyebabkan hasil suara PPP pada pemilu tahun 1987 turun secara signifikan.

Perolehan suara PPP bahkan turun sebanyak 50 persen.



## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal dan Artikel

- Affan Gaffar, "Islam dan Politik dalam Era Orde Baru", dalam *Jurnal Unisia*, No. 17, Tahun XIII Triwulan VI, 1993.
- Bahri, Saiful, *Peran Kiai Dalam Mediasi Untuk Penyelesaian Konflik Pasca Pernikahan Dini Di Madura*, Al-Manhaj, Jurnal Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Madura.
- Faridl, Miftah, "Peran Sosial Politik Kiai di Indonesia" dalam *Jurnal Mimbar*, Volume XIX, No. 2, April-Juni, 2003.
- Farchan, Yusa', *Dinamika Sistem Politik Otoritarianisme Orde Baru*, Jurnal ADHIKARI, Vol.1 Tahun 2022,
- Pribadi, Yanwar, *Relasi Kiai, Masyarakat, dan Negara: Konfigurasi Politik Pemilu pada Masa Orde Baru di Madura*, Jurnal Ma'arif Insitut.
- Rohmatin, Ainur, "Relasi informal dan Formal Politik PKB dalam Penjaringan Calon Bupati Sumenep tahun 2015", dalam *Jurnal Politik Muda*, Vol. 5, No. 2, April-Juli 2016.
- Romli, Lili, *Reformasi Partai Politik Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia*, Politica Vol. 2, No. 2, November 2011.
- Zamroni, Imam, "Juragan, Kiai, dan Politik di Madura" dalam *Jurnal UNISIA*, Vol. XXX, No. 65, September, 2007.

### Buku, Skripsi, dan Tesis

- Abdurrahman, Dudung, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, Yogyakarta: Ombak, 2011.
- Abdurrahman, Dudung, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Adib, H. Mohammad, MA, *Etnografi Madura*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2011.

- Antlöv, Hans. "National Elections, Local Issues: the 1997 and 1999 National Elections in a Village on Java". Dalam *Elections in Indonesia: the New Order and Beyond*, London: RoutledgeCurzon, 2004.
- Ariffin, Munawir, *Sejarah Konflik Partai Persatuan Pembangunan di Masa Orde Baru*, Candrasangkala: Jurnal Pendidikan dan Sejarah, Vol. 5, No. 1 Mei 2019.
- Azizi, Taufiqil, Ach., *Dinamika NU di Sumenep dalam Lintasan Masa*, Sumenep: Zave Press, 2016.
- Barton, Greg, *Biografi Gus Dur, The Authorized Biografi of Abdurrahman Wahid*, Yogyakarta: Penerbit Lkis, 2011.
- Burhanuddin, Safri, dkk, *Sejarah Maritim Indonesia*, Pusat Kajian Sejarah dan Budaya Maritim Asia Tenggara: LP. Univ Diponegoro Semarang, 2018.
- Dhakidae, Daniel, dalam *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru* Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003.
- De Jonge, Huub, *Madura dalam Empat Zaman*. Jakarta: PT. Gramedia, 1989.
- Feillard, Andree, *NU Vis a Vis Negara*, ter. Lesmana. Yogyakarta: LkiS, 1999.
- Gaffar Karim, Abdul, *Menegosiasi Ulang Indonesia, Perubahan Politik dan Lembaga-Lembaga Agama di Manado dan Sumenep dalam Era Awal Reformasi*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Geertz, Clifford, "Religious Belief and Economic Behaviour in a Central Javaneses Town: Some Preliminary Considerations," *Economic Development and Cultural Change*, 1956. No. 4.
- Hadi, Sutrisni, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Fak. Psikologi UGM, 1978.
- Hasan, Afif, *Pola Pembangunan Masyarakat Desa Oleh Pondok Pesantren An-Nuqayah Studi Deskriptif Tentang Biro Pengabdian Masyarakat Pondok Pesantren An-Nuqayah Guluk-Guluk Sumenep*, Tesis, Malang: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang, 1995.
- Halim, Abdul, *Sosiologi Politik Etnik; Studi Otoritas dan Demokrasi Lokal Masyarakat Madura*, Malang: Intelegensia Media 2020.

- Hefni, Mohammad, *Islam Madura, Sebuah Studi Konstruktivisme-strukturalis tentang Relasi Islam Pesantren dan Islam Kampung di Sumenep Madura*, Malang: Literasi Nusantara, 2019.
- Heyst, J.G. van, “Memori Residen Mdura (J. G. van Heys)”, dalam ANRI, *Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Timur dan Tanah Kerajaan)*, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1978.
- Ihsani, Aufannuha, *Kebangsawanan di Tengah Perubahan: Kehidupan Sosial Kaum Ningrat Sumenep tahun 1950-an*, Yogyakarta: UGM, 2020.
- Juwono Slamet, Eddy, “Madura Masa Lalu, kini dan Masa yang Akan Datang Sebuah Tinjauan Pustaka Perilaku Ekonomi”, dalam Aswab Mahasin (Ed), *Ruh Islam dalam Budaya Bangsa II; Aneka Budaya di Jawa*, Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1996.
- Karim, M. Rusli, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Kartoatmodjo, Martinus M. S, *Sekitar Masalah Hari Jadi Sumenep*, Sumenep: Badan Pengembangan Pariwisata Daerah, 1990.
- Koentjaraningrat, “Masyarakat Pedesaan di Indonesia”, dalam penyunting Koentjaraningrat (ed.), *Masalah-masalah Pembangunan*, Jakarta: LP3S, 1982.
- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2003.
- Kuntowijoyo, *Perubahan Agraris dalam Masyarakat Madura 1850-1940*, Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002.
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang, 2005
- Kuntowijoyo, “Memahami Madura Sebuah Pendekatan Sosial-Historis, Ekologi dan Kependudukan”, dalam Kuntowijoyo (ed.), *Radikalisasi Petani*, Yogyakarta: Bentang, 1993.
- Kuntowijoyo, “Agama Islam dan Politik: Gerakan-gerakan Sarekat Islam Lokal di Madura, 1913-1920”, dalam Huub De Jonge (ed.), *Agama, Kebudayaan, dan Ekonomi Studi-studi Interdisipliner tentang Masyarakat Madura*, Jakarta: Rajawali Pers, 1989.

- Langenberg, Michael van. "The New Order State: Language, Ideology, Hegemony". Dalam *State and Civil Society in Indonesia*, Centre for Southeast Asian Studies, Monash University, 1990
- Leunissen, Jef, "Pertanian Rakyat di Madura", dalam Huub De Jonge (ed.), *Agama Kebudayaan dan Ekonomi Studi-studi Interdisipliner tentang Masyarakat Madura*, Jakarta: Rajawali Press, 1989.
- Lubis, Saiful Akhyar, *Konseling Islami Kiai dan Pesantren*, (Yogyakarta, eLSAQ Press, 2007), hlm. 169. Baca juga Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta: LP3ES, 1982.
- Mansoornoor, Iik Arifin, *Islam in an Indonesian World: Ulama of Madura*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990.
- Murdniatmo, Gatut dan H. J. Wibowo, *Sistem Pelapisan Sosial dalam Komunitas Orang Madura di Sumenep*, Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983/1984.
- Nakamura, Mitsuo, "Tradisionalisme Radikal: Catatan Muktamar Semarang 1979" dalam Greg Fealy, Greg Barton, *Tradisionalisme Radikal, Persinggungan Nahdhatul Ulama-Negara*, Yogyakarta: LkiS, 1997.
- Narwoko, Dwi dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ockers, W. H., "Memori Residen Madura Timur (W.H. Ockers), 2 Mei 1930)", dalam ANRI, *Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Timur dan Tanah Kerajaan)*, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1978.
- Riyadi, Ach., "Kiai dan Perubahan Sosial di Madura, 1935-1955", *tesis* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022
- Rozaki, Abdur, *Menabur Kharisma Menuai Kuasa*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2002.
- Siddiq, Ahmad, *Khittah Nahdhiyah* (Surabaya: Penerbit Khalista dan LTN NU, 2006
- Steenbrink, Karel A., *Recente onteikkelingen in Indonesisch Islamonderricht*, a.b. Karel A. Steenbrink dan Abdurrahman, *Pesantren, Madrasah, dan Sekolah*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1986.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Thaha, Abdul Aziz, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Ulum, Bahrul, *“Bodohnya NU”, Apa “NU Dibodohi”*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002.

Wahid, Abdurrahman, *Menggerakkan Tradisi Esai-Esai Pesantren*, Yogyakarta: LkiS, 2001.

Machmud, Amir, *Prajurit, Pejuang: Otobiografi*, Jakarta: Rora Karya Offset, 1987.

#### Daftar Narasumber

No	Nama	Tahun Lahir	Alamat	Kredibilitas Informan	Tanggal Wawancara
1.	Zawawi Imron	1943	Batang-Batang	Kiai dan PNS	12 Mei 2023
2.	Muhammad Hafidz	1943	Pulau Gili Genting	Kiai dan PNS	25 Juni 2023
3.	Thalabuddin	1956	Lenteng	Kiai, Pimpinan Pesantren Mambaul Ulum	22 Desember 2020
4.	Ahmad Baidhawi	1971	Saronggi	Anak anggota DPR dan pemimpin pesantren Raudatul Islam	22 Desember 2020
5.	Darwis	1966	Batang-Batang	Anak anggota DPR dan Pemimpin pesantren Nurul	11 Januari 2023

				Jadid	
6.	Salman	1952	Batu Putih	Masyarakat biasa dan anggota NU	12 Januari 2023
7.	Syakran	1944	Preduan	Pegawai negeri sipil dan guru di pesantren	18 Juli 2021
8.	Abdul Mannan	1946	Batu Putih	Masyarakat biasa	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA